

SKRIPSI

TELAAH KRITIS KONSEP KEAGENAN DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF ISLAM EMANSIPATORIS

NURUL JIHAN HASRIL



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

TELAAH KRITIS KONSEP KEAGENAN DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF ISLAM EMANSIPATORIS

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURUL JIHAN HASRIL
A031171510**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

TELAAH KRITIS KONSEP KEAGENAN DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF ISLAM EMANSIPATORIS

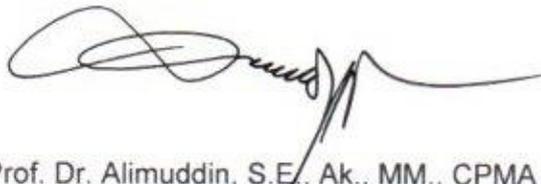
disusun dan diajukan oleh

NURUL JIHAN HASRIL
A031171510

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

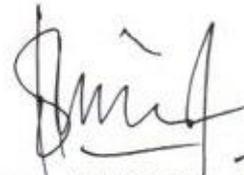
Makassar, 22 Mei 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA
NIP. 19591208 198601 1 003

Pembimbing 2



Hj. Rahmawati H.S, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19761105 200701 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

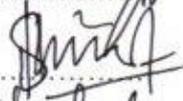
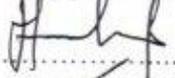
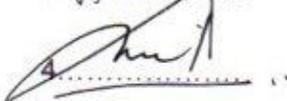
TELAAH KRITIS KONSEP KEAGENAN DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF ISLAM EMANSIPATORIS

disusun dan diajukan oleh

NURUL JIHAN HASRIL
A031171510

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **08 Juni 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Ketua	1. 
2.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nurul Jihan Hasil

NIM : A031171510

departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1 (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

TELAAH KRITIS KONSEP KEAGENAN DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF ISLAM EMANSIPATORIS

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Jihan Hasil

PRAKATA

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah.”

Puja dan puji Ilahi Tuhan semesta alam, tertuang rasa syukur hanya kepada-Nya atas limpahan nikmat yang tak henti tumpahrukan kepada kita semua. Dialah pemilik ilmu pengetahuan yang memberikan anugerah sekaligus tanggung jawab kecerdasan pikiran dan terangnya penglihatan agar manusia tidak lalai dalam bertindak sebelum tahu benar salahnya sesuatu. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, serta para sahabat-sahabatnya.

Menjadi karya tulis ilmiah perdana membuat proses dibalik penyusunan karya ini memiliki kesan tersendiri bagi penulis. Agar dapat merampungkan karya ini, kemampuan penulis dalam berpikir secara sistematis sekaligus mendalam ditempa dari waktu ke waktu. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya karya ini.

The place I always called home, kedua orang tua penulis, Ayah Hasril dan Bunda Yusriani Djafar atas doa dan hati yang senantiasa tulus dan sabar dalam mendukung setiap langkah penulis. Juga saudari Farah atas bantuan dan dukungannya selama ini.

My academic contributor. Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA atas diskusi dan kritik yang kian mempertajam pemikiran penulis. Pembimbing II, Ibu Hj. Rahmawati H.S, S.E., M.Si., Ak., CA atas saran dan motivasi kepada penulis. Terima kasih bagi segenap penguji, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA atas saran dan masukan terhadap argumen penulis. Juga kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr.

Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., serta Ketua dan Sekretaris Jurusan, Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.SI dan serta semua pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanpa terkecuali. Tidak luput semua orang tua penulis di kampus, Pak Ical, Pak Richard, Pak Tarru, Pak Bur, Pak Rahim, Pak Malik, Ibu Ida, Mama Rohani, Mama Aji, dan Kak Tia.

My unconditional supporters, who joined me on through the lows and highs. Nurul Hikmah Meilani, who was always there to pick up the phone, Ainun Salsabila, who has been nothing but the best companion one could ever wish for, Annesyah Dewi Karina, who is gifted to see the light in everyone, Kak Annisa Febriana, who was always giving the best and loudest support and Afrizal As-Siddiq, the one who effortlessly unravels those tangled minds.

The company in the journey of changing. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi Unhas yang telah menjadi tempat bersemainya pengetahuan penulis. Terima kasih banyak kepada kak Abot, kak Sute, kak Agung, kak Ifan, kak Dede, kak Dewi, kak Nur, kak Ibnu, kak Faisal yang tidak pernah berhenti mendorong penulis untuk mengasah pengetahuan yang penulis miliki. Anggota Berenstein Family, Fauhan, Didit, Yasin, Ulil, Lulu, Rahmat, Kumbang, Husein, dan Opi yang menjadi teman diskusi dan berproses. Millenials dan Immortal2017 yang banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. Juga segenap jajaran #HMITransformatif, IMA FEB UH, GenBI Sulawesi Selatan, Genbi Unhas khususnya New Face of GenBI Unhas (Kiran, Meilani, Ica, Ancis, Laras, dan Asfa), AIESEC in Unhas, *especially* Celebes 2020 (Nando, Fay, Kak Sofi, Rhadia, Andre, dan Bintang) dan ASSETS 2020 (Kak Anto, Kak Dinda, Conny, dan Fila) yang telah menjadi tempat menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki penulis.

Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini. Saran serta kritik sangat penulis butuhkan demi menyempurnakan karya ini.

Makassar, 22 Mei 2023

Nurul Jihan Hasril

ABSTRAK

Telaah Kritis Konsep Keagenan dalam Tinjauan Perspektif Islam Emansipatoris

A Critical Review Towards Agency Concept in Islamic Emancipatory Perspective

Nurul Jihan Hasril
Alimuddin
Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi teori keagenan berdasarkan perspektif Islam. Jenis penelitian ini berkisar pada tinjauan literatur di mana sumber-sumber penting telah dikutip. Penelitian ini berupaya untuk meletakkan dasar konseptual dalam memahami konflik keagenan. Makalah ini menyimpulkan bahwa prinsip Islam bertolak belakang dengan konsep keagenan konvensional. Dengan menggunakan perspektif Islam emansipatoris, konsep keagenan Islam dihadirkan dengan tetap berbasis etika namun tidak luput terhadap sistem sosial yang hadir. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang teori keagenan dengan menawarkan perspektif alternatif yang berakar pada prinsip dan nilai Islam. Penelitian lebih lanjut didorong untuk mengeksplorasi implikasi praktis dan aplikasi potensial dari keagenan Islam dalam konteks organisasi.

Kata kunci: *Agency Theory, Islamic Agency Theory, Konflik Keagenan*

This research critically examines the agency theory through an Islamic lens. It adopts literature review approach, citing relevant and significant sources. The objective is to establish a conceptual framework for understanding agency conflicts. The findings indicate a fundamental divergence between Islamic principles and conventional agency concepts. Drawing on an emancipatory Islamic perspective, the research introduces the concept of Islamic agency, which upholds ethical considerations while acknowledging the prevailing social system. This study contributes to the ongoing discourse on agency theory by offering an alternative perspective rooted in Islamic principles and values. Further research is encouraged to explore the practical implications and potential applications of Islamic agency within organizational contexts.

Keywords: *Agency Theory, Islamic Agency Theory, Agency Conflict*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Konsep Keagenan.....	16
2.1.1 Historisitas Konsep Keagenan.....	16
2.1.2 Ruang Lingkup	19
2.1.3 Asumsi Perilaku Manusia dalam Konsep Keagenan	23
2.1.4 Masalah Keagenan.....	24
2.1.5 Biaya Keagenan (<i>Agency Cost</i>).....	28
2.2 Prinsip Dasar Islam.....	29
2.2.1 Tauhid sebagai Pondasi Keimanan	29
2.2.2 Konsep Manusia sebagai Khalifah.....	34
2.3 Konsep Islam Emansipatoris	37
2.3.1 Konteks Kelahiran Gagasan Islam Emansipatoris	37
2.3.2 Prinsip Dasar Islam Emansipatoris	39
2.4 Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Jenis dan Sumber Data	42
3.2.1 Jenis Data	42
3.2.2 Sumber Data	43
3.3 Metode Pengumpulan Data	43
3.4 Metode Analisis Data	44
BAB IV MENINJAU PRINSIP EKONOMI ISLAM SEBAGAI LANDASAN	
HUBUNGAN KEAGENAN.....	47
4.1 Gagasan Utama Konsep Keagenan	47
4.1.1 Perilaku Manusia dalam Hubungan Keagenan Islam	52
4.1.2 Perspektif Organisasi dalam Islam	54

4.2	Komparasi Konsep Keagenan Konvensional dan Konsep Keagenan Islam.....	58
4.3	Pengaruh Hubungan Keagenan dalam Institusi Keuangan Islam	61
BAB V EKSPLORASI KONSEP KEAGENAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM		
	EMANSIPATORIS	65
5.1	Sistem Akhlak Islam sebagai Basis Perilaku Keagenan	65
5.2	Struktur Keagenan dalam Institusi Keuangan Islam	69
5.3	Aplikasi Konsep Keagenan Islam terhadap Isu Akuntansi	72
5.4	Tinjauan Kritis atas Konsep Keagenan Islam	75
BAB VI PENUTUP		
	6.1 Kesimpulan	80
	6.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN.....		88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Gambaran Umum Teori Agensi	20
2.2 Penelitian berkaitan dengan tinjauan Islam terhadap Agency Theory	22
4.1 Skema Perbandingan Konsep Keagenan Konvensional dan Islam.....	61
5.1 Perbandingan Prinsip Konsep Keagenan dan Implikasinya.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Prosedur Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia akademik, posisi teori memiliki posisi yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kerlinger seperti dikutip (Belkaoui-Riahi, 2000:72) mendefinisikan teori sebagai “sekumpulan gagasan (konsep), definisi, dan dalil yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena, dengan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dan bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut”. Melihat definisi tersebut, posisi teori menjadi tumpuan yang diperlukan dalam menjelaskan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi.

Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, akuntansi juga menggunakan teori sebagai fondasi dalam perkembangan ilmu akuntansi, baik secara praktis maupun teoretis. Penggunaan teori sebagai landasan memungkinkan akuntansi bertransformasi dari waktu ke waktu guna menjawab permasalahan yang hadir. Menurut Hendriksen (1977:1) teori akuntansi merupakan *“logical reasoning in the form of a set of broaden principles that (1) provide a general frame of reference by which accounting practice can be evaluated and (2) guide the development of new practices and procedures”*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa teori akuntansi merupakan sekumpulan prinsip-prinsip luas yang berkemampuan dalam menyajikan suatu kerangka di mana praktik akuntansi dapat dinilai dan dapat mengarahkan pengembangan praktik dan prosedur baru.

Untuk melihat perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri, Godfrey (1992:3) membaginya ke dalam empat periode. Periode perkembangan akuntansi dimulai dengan *Pre Theory Period* (1942-1800), di mana dalam periode ini belum ada perumusan teori yang jelas dan tersistematis namun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pencatatan keuangan sudah mulai hadir. Di periode kedua atau disebut dengan *General Scientific Period* (1800-1955) dimulai dengan munculnya kerangka untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi yang digunakan pada saat itu. Masuk ke tahap ketiga atau *Normative Period* (1956-1970), di mana perdebatan yang mencuat mulai menyoal mengenai bagaimana model-model praktik akuntansi yang baik dan benar. Kemunculannya ditandai dengan berkembangnya “norma-norma” di akuntansi yang menentukan suatu praktik akuntansi yang seharusnya. Periode terakhir yaitu *Specific Scientific Period* (1970-sekarang) merupakan periode di mana perkembangan akuntansi mulai menggunakan data-data empiris yang dipadankan dengan teknik statistik untuk melakukan pengujian. Hal ini diperlukan untuk memprediksi perilaku-perilaku akuntansi yang berkaitan dengan masa depan. Periode ini juga disebut dengan “*positive era*”.

Wajah teori akuntansi hari ini masih erat pengaruhnya dengan pandangan positif yang dominan berkembang di tahun 1970, di mana sejumlah artikel yang terbit di beberapa jurnal akuntansi hampir semuanya menggunakan pendekatan yang berciri matematis dan pengujian hipotesis. Munculnya teori akuntansi positif merupakan sebuah bentuk kritik atas teori akuntansi normatif yang berkembang di periode sebelumnya. Pendekatan normatif sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis teori akuntansi dinilai terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoretis yang kuat. Berangkat dari ketidakpuasan terhadap teori normatif tersebut melahirkan suatu pendekatan yang berorientasi pada

penelitian empiris atau yang lebih dikenal dengan akuntansi positif (Januarti, 2004)

Dalam perkembangannya, pendekatan positif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan akuntansi. Salah satu model pendekatan yang berkembang bersamaan dengan paradigma positif ini ialah pendekatan teori agensi. Dalam perkembangan penelitian akuntansi positif, penggunaan pendekatan teori agensi setidaknya mulai diperkenalkan dan digunakan pada tahapan kedua dari perkembangan paradigma positif sebagai corak penelitian akuntansi yang berkembang saat itu (Januarti, 2004). Selain populer digunakan dalam penelitian akuntansi, teori ini banyak pula digunakan di berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, ekonomi, hingga sosiologi (Zogning, 2017). Keberadaan masalah keagenan yang luas di berbagai bidang telah menjadikan teori ini sebagai salah satu teori terpenting dalam literatur keuangan dan ekonomi (Panda dan Leepsa, 2017).

Di konteks ilmu akuntansi, teori agensi atau keagenan digunakan dalam menjelaskan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan agen di suatu organisasi maupun perusahaan. Setidaknya, teori ini mulai dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976. Sejak itu, teori keagenan mulai dikembangkan dan diterapkan untuk membahas kebanyakan fenomena organisasi atau perusahaan seperti kompensasi, strategi akuisisi dan diversifikasi, hubungan dewan, maupun struktur kepemilikan dan pembiayaan (Eisenhardt, 1989).

Salah satu penelitian yang membahas konsep keagenan yang digunakan oleh Jensen dan Meckling adalah penelitian yang dilakukan oleh Eisenhardt di tahun 1989. Dalam tulisannya yang berjudul *Agency Theory: An Assessment and Review*, ia membagi konsep keagenan dalam dua model pendekatan yaitu

pendekatan positifis dan pendekatan *principal* agen. Model keagenan yang digunakan oleh Jensen dan Meckling termasuk dalam pendekatan positifis di mana penggunaannya lebih difokuskan pada kasus spesifik yang terjadi pada suatu perusahaan. Sedangkan pendekatan *principal* dan agen memiliki fokus yang lebih umum dan luas sehingga ia lebih jarang digunakan dalam mengungkap permasalahan yang ada di perusahaan (Kurniawansyah *et al.*, 2018)

Walaupun penggunaannya yang populer dalam berbagai penelitian namun konsep keagenan berkembang menjadi konsep yang kontroversial khususnya pada model keagenan positifis. Heath (2009) menemukan bahwa terdapat beberapa potensi masalah dari hadirnya pemberlakuan motivasi berbasis kepentingan diri sendiri (*self-interest*) dan penekanan terhadap keunggulan pemegang saham atau *principal* yang hadir dalam hubungan antara *principal* dan agen. Selain itu, Heath (2009) juga melihat bahwa penggunaan teori keagenan sebagai metodologi dalam mengungkap permasalahan cenderung menghasilkan gambaran yang terdistorsi tentang bagaimana organisasi berjalan.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan oleh Panda dan Leepsa (2017) yang menjelaskan bahwa teori agensi memiliki asumsi bahwa kontrak dapat menghilangkan masalah keagenan, namun dalam praktiknya hal tersebut menghadapi kendala seperti hadirnya asimetris informasi, rasionalitas, hingga penipuan. Kepentingan *principal* yang hanya berfokus pada pemaksimalan pengembalian membuat peran mereka sangat terbatas sehingga muncul anggapan bahwa manajer sebagai seorang yang oportunistik (Panda dan Leepsa, 2017).

Chua (1986:609) menambahkan bahwa teori keagenan juga memiliki ketidakmampuan dalam menjangkau persoalan struktural yang berakibat pada tidak terungkapnya potensi eksploitasi pada pekerja yang diakibatkan oleh distribusi akses sumber daya sosial dan ekonomi yang tidak merata. Teori keagenan sama sekali tidak obyektif dan secara samar memiliki kemampuan untuk merasionalkan, menormalisasi, dan melegitimasi berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan buruh seakan-akan kaum buruh memperoleh banyak manfaat dari sistem yang sesungguhnya sangat eksploitatif (Chwastiak, 1999).

Argumen serupa juga diajukan oleh Htay (2012) yang mendapati bahwa dalam situasi tertentu, rekomendasi yang diberikan oleh teori agensi tidak sesuai dengan temuan yang ada di lapangan. Salah satu rekomendasi tersebut menyarankan agar struktur kepemimpinan dewan dibuat terpisah namun hal tersebut bertentangan dengan ekspektasi teoritis. Sebagai contoh, hasil dari penelitian Nahar (2004) dan Hock (2007) menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dewan tidak menunjukkan hubungan dengan kinerja perusahaan. Temuan Bozec dan Dia (2005) serta Leng dan Shazaili (2005) juga menemukan bahwa struktur kepemimpinan gabungan memiliki kinerja yang lebih tinggi secara signifikan.

Pandemi yang hadir di awal tahun 2020 merupakan fenomena yang membantu untuk memperlihatkan bagaimana kerentanan para pekerja sebagai agen berada pada kondisi yang sangat dirugikan. Pemandangan pemutusan hubungan kerja atau yang disingkat PHK jamak terlihat sebagai salah satu efek dari macetnya roda perekonomian. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja yang dikutip dari laman [Idxchannel](#), per 30 Agustus 2020, sejumlah 2.175.928

pekerja ter dampak pandemi Covid-19, di mana ada 1.156.600 pekerja yang di rumahkan, 633.421 pekerja informal bangkrut, dan 386.877 pekerja di-PHK.

Ironisnya, keadaan yang sebaliknya justru terjadi pada pemilik (*principal*) di mana para agen tersebut bekerja. Mereka seakan meraup keuntungan dari kejadian ini. Kondisi tersebut didasari oleh temuan yang dimuat dalam *briefing paper* yang diterbitkan oleh *Oxfam International* berjudul *The Inequality Virus* (2021), di mana terjadi peningkatan yang signifikan pada kekayaan yang dimiliki beberapa pemilik perusahaan ketika pandemi berlangsung. Dalam *paper* tersebut dilaporkan bahwa hanya 3 dari 50 orang dari pemilik perusahaan tersebut yang melihat kekayaan mereka berkurang selama periode Maret hingga Desember 2020. Hal ini menjadi pertanda semakin parahnya kesenjangan sosial yang menjadi salah satu tipikal corak hasil struktur yang tercipta dari tatanan sosial hari ini, yaitu kapitalisme.

Degradasi dan eksploitasi tenaga kerja dalam masyarakat kapitalis bukanlah hasil dari proses evolusioner alami dalam organisasi sosial kerja semata. Ini terbukti dari fakta bahwa sistem eksploitatif, seperti kapitalisme, harus dipertahankan dengan aturan ataupun propaganda, di mana ideologi dominan menanamkan keyakinan bahwa ketidakadilan dalam masyarakat tidak dapat dihindari. Model *principal*-agen sendiri telah menjadi paradigma populer dalam penelitian akuntansi yang melayani semua fungsi ideologi dominan tersebut (Chwastiak, 1999)

Zogning (2017) melihat bahwa teori keagenan mengadopsi nilai dari sistem ekonomi kapitalisme karena menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa, intuisi, spiritual, saling menghormati, saling percaya dan kejujuran. Senada dengan hal tersebut, Shamsuddin dan Ismail (2013) memaparkan bahwa teori keagenan konvensional didominasi oleh kepentingan pribadi serta

individualisme yang mencoba memaksimalkan utilitas milik *principal* yang berakibat pada kemunculan masalah keagenan yang tidak dapat diselesaikan.

Menurut Zogning (2017), versi klasik dari teori keagenan menyatakan bahwa agen harus selalu bertindak demi kepentingan *principal* di mana terdapat anggapan bahwa kepentingan *principal* selalu dapat diterima atau bahwa agen harus sering bertindak bertentangan dengan etika demi memenuhi "kontrak" dalam hubungan keagenan. Dengan begitu teori keagenan dibangun dengan memandang manusia sebagai makhluk yang selalu bertindak atas naluri yang egois dan serakah (Ruslan, 2013).

Di sisi lain, Islam memberikan perhatian terhadap persoalan terkait hubungan. Al-Quran sendiri memberikan pemahaman bahwa hubungan apa pun di dunia ini, terutama bagi umat Islam, harus dimulai dengan hubungan dengan Allah swt. Hubungan tersebut terjalin dalam bentuk penghambaan yang memiliki hakikat berupa ketaatan, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah swt. Eksistensi manusia dan segala dinamikanya ditujukan untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah swt. Hikmah penciptaan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah di mana posisi Allah swt. sendiri tidak membutuhkan ibadah mereka namun ciptaan-Nya lah yang membutuhkan ibadah tersebut sebagai akibat dari ketergantungan mereka kepada Allah swt.

Hadirnya konsep penyembahan kepada Allah swt. juga merupakan konsekuensi penyaksiannya atas sifat ke-Esaan Allah swt. yang tersirat dalam pemaknaan *syahadatain* yang merupakan komitmen manusia untuk menjalankan fungsi penciptaan dengan mempersaksikan ketiadaan Tuhan selain Tuhan yang sejati. Mengutip Al-Fauzan (2012:63) dalam karyanya Kitab Tauhid menjelaskan bahwa :

Makna syahadat *la ilaha illallah* adalah meyakini dan mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah swt., menaati hal tersebut dan mengamalkannya. *La ilaha* menafikan hak penyembahan dari selain Allah, siapa pun orangnya. *Illallah* adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah

Pengendalian iman melalui membangun hubungan yang konkret dengan Allah swt., akan menentukan pula hubungan yang baik dengan manusia lain dan makhluk hidup lainnya di dunia ini (Shamsuddin dan Ismail, 2013). Hakikat dari penyembahan tersebut membuat seorang muslim tidak akan terjebak kepada penyembahan yang sifatnya jangka pendek seperti penyembahan kepada atasan atau penyembahan kepada makhluk lainnya yang tidak memiliki kekuatan, tetapi sembah yang sifatnya abadi (Alimuddin, 2013).

Baqir (2010:154) sendiri menegaskan bahwa hubungan yang terjalin antar manusia adalah hubungan antara dua orang rekan yang menjalankan kewajiban yang sama sebagai *khalifah* dan bukan hubungan antara majikan dengan budak. Khalifah merupakan makhluk yang melaksanakan tugas-tugas kehidupan di muka bumi secara optimal sesuai dengan kapasitasnya, dalam koridor ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan Allah swt. baik dalam motivasi, bentuk tindakan maupun efek yang ditimbulkan (Budiyanti *et al.*, 2020).

Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan mengemban tiga tugas utama yaitu menyembah kepada Allah swt., memakmurkan bumi, dan sebagai *khalifah* (Alimuddin, 2013), Misi penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya :

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pengangkatan predikat manusia sebagai khalifah berkaitan erat dengan potensi rasionalitas yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan berfikir serta

pengolahan ilmu pengetahuan memiliki pengaruh yang mendalam dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki keutuhan fisik (jasmani) dan komposisi spiritual memungkinkan manusia untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan alam agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin (Helmi, 2018)

Bersamaan dengan konsep khalifah, manusia merupakan pelaku ekonomi yang diperbolehkan untuk menggunakan sumber daya ekonomi atau harta benda dengan tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dalam pengertian kepemilikan Islam, kepemilikan mutlak dimiliki oleh Allah swt. yang memiliki konsekuensi terhadap peran seorang agen (wakil) sebagai wali tidak hanya bertanggung jawab kepada *principal* (muwakkil) tetapi juga kepada pencipta dan pengendali bumi yaitu Allah swt. (Shamsuddin dan Ismail, 2013)

Sebagai imbas dari perkembangan akuntansi positif yang berkelindan dengan dominasi ideologi kapitalisme, posisi konsep keagenan konvensional yang digunakan kebanyakan penelitian akuntansi didasari oleh nilai-nilai yang sarat akan individualistis, materialistis, dan egoistik. Hal tersebut justru sangat kontras dengan ajaran Islam yang menawarkan cara pandang holistik yang berbasis epistemologi tauhid dalam bangunan ilmu pengetahuannya.

Meyakini konsepsi tauhid atau monoteisme Tuhan merupakan fondasi mendasar dalam ajaran Islam yang memiliki konsekuensi penting terhadap perilaku manusia yang meyakinkannya. Yazdi (2012:181) memaparkan konsekuensi tersebut ialah bahwa manusia hendaknya tidak memandang siapa pun dan apa pun yang berhak disembah selain Allah swt. semata. Dengan begitu, apa pun selain Pencipta dan Pengatur makhluk tidak berhak disembah.

Gagasan mengenai tauhid ini selanjutnya dikenal juga dengan ilmu kalam yang perumusannya dibagi menjadi dua metode yaitu nalar tradisional dan nalar

emansipatoris. Jenis pertama menerapkan kerangka berpikir yang bersifat melangit dengan berpijak pada teks di mana realitas faktual harus sesuai dan tunduk pada teks yang berakibat pada model perumusan yang terpisah dengan realitas. Berbeda dengan tradisional, nalar ilmu kalam emansipatoris secara komprehensif tidak berhenti pada pembongkaran teks, tetapi teks dijadikan sebagai sarana pembebasan. Konsep emansipatoris ini hadir untuk mengatasi keterbatasan nalar tradisional dengan mengintegrasikan teori kritis ke dalam pembacaan teksnya sehingga perumusannya akan bersifat kontekstual dan sesuai dengan realitas material yang hadir (Dahlan, 2012)

Anggraeni (2011) menjelaskan bahwa istilah emansipatoris mempunyai pengertian bahwa Islam mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Pembebasan dari ikatan- ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuasaan semu (*pseudo power*) dan pembebasan dari ideologi semu.

Perkembangan nalar Islam emansipatoris ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Hassan Hanafi – seorang pemikir dan filsuf muslim kontemporer- yang berpendapat bahwa pemikiran akidah Islam haruslah dibangun atas pengalaman di mana manusia hidup dan perlu dimulai dengan kajian atas problem yang menimpa manusia. Konsekuensinya, penguraian masalah tidak lagi terhenti pada persoalan ketuhanan yang jamak digunakan oleh para tradisional namun mulai berfokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi manusia yang bersifat riil dan materiil (Dahlan, 2012)

Dalam penghayatan Islam emansipatoris terdapat empat sikap yang digunakan. Sikap pertama ialah humanis yaitu sikap yang mendasarkan bahwa kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari agama Islam. Kedua, kritis yang

mengharuskan adanya proses pengujian sebelum melakukan penolakan atau penerimaan terhadap sesuatu yang diyakini. Ketiga, transformatif yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan menjadikan perubahan sebagai kesadaran sebagai solusi atas permasalahan. Keempat, praksis yaitu hadirnya keterpaduan pemikiran dan tindakan. Keempat penghayatan tersebut menjadi sikap yang dijunjung dalam menggunakan paradigma Islam sebagai bentuk telaah ulang terhadap wacana keagamaan (Verdiansyah, 2004)

Dahlan (2012) mengatakan bahwa penggunaan istilah emansipatoris tidak dapat dilepaskan dari sejarah teori kritis. Kritisisme digunakan sebagai kekuatan dalam mengungkap penindasan dengan memusatkan perhatiannya terhadap dua hal yaitu realitas material dan visi struktur. Realitas material ialah sebuah pemikiran yang mempertanyakan ideologi hegemonik yang bertolak pada kehidupan riil dan material atau mempertanyakan hegemoni yang bertolak pada realitas empiris sedangkan visi struktur ialah hal yang berkenaan dengan relasi, baik relasi kekuasaan dalam dunia produktif (majikan-buruh), maupun relasi hegemonik, dalam hubungan pemberi dan penerima narasi (ulama-umat), maupun relasi politik (penguasa-rakyat) (Verdiansyah, 2004)

Keterbatasan yang hadir dalam konsep keagenan konvensional akhirnya mendorong untuk dilakukannya sejumlah penelitian dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Perspektif Islam dipilih oleh beberapa peneliti untuk dijadikan sebagai cara pandang untuk memeriksa konsep yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan agen. Beberapa penelitian tersebut antara lain Anggreini (2011) dan Agustin *et al.* (2020) yang menggunakan konsep amanah sebagai variabel dalam menjelaskan hubungan *principal* dan agen, Shamsuddin dan Ismail (2013) mengintegrasikan konsep tauhid sebagai basis kontrak yang

tercipta dalam hubungan keagenan dan Htay dan Salman (2020) yang melakukan evaluasi terhadap implementasi dari konsep keagenan.

Dalam kebanyakan penelitian tersebut, intervensi yang digunakan peneliti cenderung bercorak teosentris yang berakibat pada terbentuknya hubungan keagenan yang terkesan altruis dan seakan terpisah dengan realitas keseharian manusia. Kuterpisahkan itu berujung pada pengabaian atas kritik sentral antara hubungan *principal* dan agen yang tersembunyi pada karakternya yang eksploitasi.

Penggunaan konsep keagenan yang jamak dalam mengurai permasalahan, membuatnya menjadi salah satu konsep penting khususnya ketika membahas persoalan yang berkaitan dengan tata kelola sebuah organisasi ataupun perusahaan. Namun di balik hal tersebut, penggunaan teori agensi ternyata menemui keterbatasan. Kehadiran asumsi yang menganggap *principal* sebagai sosok individualis karena hanya mementingkan keuntungannya semata dan agen sebagai seorang yang oportunistis dalam melakukan pekerjaannya berakibat pada hadirnya masalah keagenan. Jika ditelusuri, kehadiran asumsi tersebut tidak terlepas dari pandangan positif yang bertalian dengan ideologi kapitalisme sebagai corak yang dominan pada saat teori agensi tersebut berkembang.

Berangkat dari keadaan tersebut, penelitian yang kiranya dapat menemukan komposisi yang memadai terhadap konsep keagenan menjadi perlu untuk diupayakan. Usaha tersebut ingin dilakukan dalam penelitian ini dengan mengintegrasikan ideologi Islam sebagai ajaran yang memiliki bangunan epistemologi yang secara esensi berbeda dengan komponen penyusun konsep keagenan konvensional. Perbedaan epistemologi tersebut melahirkan nilai-nilai yang bertolak belakang di antara keduanya. Hal itu tercermin dari konsep

keagenan konvensional yang lekat dengan nilai-nilai yang bersifat individualis dan materialis sementara Islam yang cenderung mengedepankan nilai spiritualisasi melalui konsep penyembahan dan khalifahnyanya.

Nilai-nilai yang berasal dari pengesaan Tuhan tersebut selanjutnya perlu dikawinkan dengan pembacaan kritis yang dapat dimungkinkan melalui intervensi konsep Islam emansipatoris. Elemen teori kritis di sini digunakan sebagai instrumen pendamping dalam mengekspos aspek eksploitatif dalam konsep keagenan konvensional dengan memperhatikan visi yang terbentuk pada relasi antara *principal* dan agen. Tendensi yang sama pada pembebasan dan keadilan menjadi basis dalam melakukan integrasi dan elaborasi antara teori kritis dan akuntansi Islam yang berupaya membentuk trajektori akuntansi yang emansipatoris.

Dalam usaha untuk mengetengahkan sumber ajaran Islam, maka dari itu penulis ingin mengangkat judul penelitian “Telaah Kritis atas Konsep Keagenan dalam Tinjauan Perspektif Islam Emansipatoris”. Mendudukan Islam sebagai alternatif cara pandang dalam membangun konsep keagenan yang emansipatoris.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dirancang dengan mengajukan dua butir pertanyaan yaitu sebagai berikut

1. Apakah konsep keagenan dapat diaplikasikan dalam menganalisis fenomena yang berkaitan dengan entitas Islam?
2. Bagaimana konsep keagenan ketika ditinjau dengan menggunakan perspektif Islam Emansipatoris?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep keagenan yang dapat digunakan dalam menganalisa fenomena yang terjadi pada entitas Islam serta melakukan peninjauan terhadap konsep keagenan dengan menggunakan perspektif Islam emansipatoris.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian akuntansi yang menggunakan perspektif Islam dalam pengkajiannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bersifat teoretis maupun praktis. Dalam segi teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu akuntansi Islam. Adapun terkait manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi ataupun bahan bagi penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang terkait dengan judul penelitian yang berasal dari referensi – referensi kepustakaan

seperti buku, jurnal, ataupun artikel yang mampu menunjang pengembangan kerangka pikir selanjutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yakni terkait dengan bentuk dan paradigma penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan, yang membahas hasil dari penelitian yang berjudul "Telaah Kritis Konsep Keagenan dalam Tinjauan Perspektif Islam Emansipatoris"

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Keagenan

Menurut Kumalasari dan Sudarma (2013) teori agensi yang diterapkan saat ini khususnya teori yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976), belum memiliki definisi yang begitu jelas. Mereka menemukan bahwa teori agensi tidak memenuhi beberapa kriteria untuk dapat diklasifikasi sebagai sebuah teori. Dengan begitu, ia menyarankan untuk mengategorikan keagenan sebagai sebuah konsep, alih-alih sebuah teori yang telah melalui beberapa tahapan ilmiah yang lebih kompleks.

Dalam penggunaannya, Kumalasari dan Sudarma (2013) juga mendapati bahwa masyarakat memperlakukan konsep keagenan sebagai acuan tanpa melihat kembali sejarah pembentukan keagenan tersebut. Menurutnya, hal tersebut akan berimbas pada tidak memadainya pemahaman masyarakat terhadap sifat, fungsi maupun cara kerja dari konsep keagenan itu sendiri.

Secara umum, bagian ini akan merincikan mengenai sejarah kemunculan konsep keagenan dan bagaimana konsep tersebut diejawantahkan dalam mengatasi permasalahan yang hadir. Perincian ini diperlukan untuk memberi gambaran sekaligus sebagai dasar untuk mengurai formulasi konsep keagenan khususnya yang berkaitan langsung dengan bidang akuntansi.

2.1.1 Historisitas Konsep Keagenan

Pembahasan dalam teori keagenan berkisar pada masalah keagenan dan bagaimana cara mengatasinya. Masalah agensi sendiri dapat ditelusuri kembali

ke masa ketika peradaban manusia mulai mempraktikkan bisnis dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa masalah keagenan merupakan salah satu masalah yang berumur cukup tua dan kemunculannya dapat ditelusuri melalui perkembangan suatu perusahaan (Panda dan Leepsa, 2017)

Dalam penelitiannya, Panda dan Leepsa (2017) menjelaskan mengenai alur penemuan dan perkembangan dari konsep keagenan. Ia mengatakan bahwa setidaknya Adam Smith merupakan orang yang pertama kali menduga kehadiran masalah keagenan. Dalam karya terkenalnya yaitu *The Wealth of Nation*, ia menduga bahwa jika sebuah organisasi dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan pemilik sebenarnya, maka ada kemungkinan mereka tidak bekerja untuk keuntungan pemiliknya. Penjelasan Smith berkaitan dengan keagenan tersebut selanjutnya menjadi faktor pendorong bagi para ekonom untuk mengembangkan aspek-aspek yang belum ditemukan dari konsep keagenan.

Selanjutnya, Berle dan Means (1932) merupakan orang yang menaruh perhatian pada masalah keagenan di mana mereka menganalisis struktur kepemilikan perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat. Hasil yang mereka peroleh menunjukkan bahwa agen yang ditunjuk oleh pemilik memiliki potensi dalam mengendalikan dan menjalankan operasi bisnis pada perusahaan tersebut. Mereka berpendapat bahwa agen memiliki kemungkinan untuk menggunakan properti perusahaan untuk tujuan mereka sendiri yang akan menciptakan konflik antara *principal* dan agen.

Masuk ke tahun 1960-1970-an, kebanyakan para ekonom mulai mengembangkan topik keagenan dengan mengeksplorasi masalah pembagian risiko (*risk-sharing*) di antara individu maupun kelompok. Dalam beberapa

literatur, digambarkan bahwa masalah pembagian risiko biasanya muncul ketika pihak yang bekerja sama memiliki sikap atau pandangan yang berbeda terhadap risiko. Jensen dan Meckling (1976) memperkaya isu tersebut dengan mempersoalkan masalah keagenan yang terjadi ketika pihak yang bekerja sama memiliki tujuan serta pembagian kerja yang berbeda. Lebih lanjut, Fama dan Jensen (1983) melakukan studi tentang proses pengambilan keputusan. Mereka memisahkan proses keputusan perusahaan menjadi dua kategori seperti manajemen keputusan dan kontrol keputusan. Mereka menyimpulkan bahwa masalah keagenan ini perlu dikendalikan untuk kelangsungan hidup perusahaan (Panda dan Leepsa, 2017)

Smith (2011:13) mengatakan bahwa artikel milik Jensen dan Meckling yang terbit di tahun 1976 membantu menetapkan *Agency Theory* sebagai teori yang dominan digunakan sebagai kerangka kerja literatur yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). Penelitian yang mereka lakukan selanjutnya digunakan sebagai dasar oleh peneliti yang tertarik untuk membahas topik yang serupa. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Eisenhardt. Ia membagi konsep keagenan menjadi dua model pendekatan yaitu model keagenan positif dan model *principal*-agen. Model *principal*-agen menjelaskan bahwa *principal* adalah pencari keuntungan dan netral terhadap risiko dan di sisi lain agen adalah penghindar risiko dan pencari keuntungan sedangkan teori keagenan positif lebih berfokus menjelaskan penyebab masalah keagenan dan biaya yang terlibat di dalamnya. Teori ini mengajukan dua proposisi di mana proposisi pertama menjelaskan bahwa jika hasil kontrak didasarkan pada insentif, maka agen bertindak untuk kepentingan *principal*. Kedua, jika *principal* memiliki informasi mengenai agen, maka tindakan agen akan dipantau dan diarahkan sesuai dengan kepentingan *principal* (Panda dan Leepsa, 2017)

2.1.2 Ruang Lingkup

Secara umum, teori keagenan dapat ditemukan di berbagai hubungan yang di mana satu pihak (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agen) sebagai orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut yang penggambaran delegasi tersebut dapat ditinjau melalui metafora kontrak. Teori keagenan berkaitan erat dengan upaya mencari penjelasan atas penyelesaian masalah yang hadir dalam hubungan keagenan. Ia memaparkan bahwa setidaknya ada dua kondisi yang ingin diatasi oleh teori ini yaitu pertama ialah ketidakmampuan *principal* dalam melakukan verifikasi atas perilaku agen dan kedua yaitu perbedaan pandangan serta tindakan antara *principal* dan agen terhadap risiko (Eisenhardt, 1989)

Teori keagenan atau dikenal sebagai hubungan *principal*-agen adalah teori di mana kontrak memungkinkan satu atau lebih orang untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan mendelegasikan beberapa pengambilan keputusan kepada agen. *Principal* adalah pemilik atau manajer organisasi yang mendelegasikan dan mengalihkan tanggung jawab atau modal kepada agen. Agen adalah manajer/karyawan dari suatu organisasi yang mengelola transaksi bisnis perusahaan untuk pemilik/*principal* (Eisenhardt, 1989)

Menurut Kumalasari dan Sudarma (2013), istilah *principal* dan agen telah dikenal sejak Hegel (1770-1831) dan Marx (1818-1883). Pada saat itu, *principal* dikenal sebagai orang yang memiliki uang tetapi tidak memiliki tenaga dan keterampilan yang cukup untuk melakukan produksi. Selanjutnya, agen adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan tenaga untuk melakukan produksi tetapi tidak memiliki uang.

Dalam berbagai pengaturan, struktur agensi dapat diterapkan mulai dari masalah tingkat makro hingga yang bersifat mikro. Pada praktiknya, teori keagenan telah diterapkan pada fenomena organisasi seperti kompensasi, strategi akuisisi dan diversifikasi, hubungan dewan, struktur kepemilikan dan pembiayaan. Secara keseluruhan, domain teori keagenan adalah hubungan yang mencerminkan struktur keagenan dasar dari *principal* dan agen yang terlibat dalam perilaku kooperatif, tetapi memiliki tujuan yang berbeda dan sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko (Eisenhardt, 1989).

Pembahasan ruang lingkup dari teori agensi sempat dituliskan oleh Eisenhardt (1989). Penjelasan mengenai gambaran umum dari teori agensi termuat dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Gambaran Umum Teori Agensi

Ide Utama	Hubungan <i>principal</i> -agen harus mencerminkan organisasi yang efisien dalam biaya informasi dan penanggulangan risiko
Unit analisis	Kontrak antara <i>principal</i> dan agen
Asumsi atas perilaku manusia	Kepentingan atas diri (<i>self-interest</i>) Berperilaku rasional Penghindaran atas risiko
Asumsi atas organisasi	Konflik tujuan antar anggota Efisiensi sebagai kriteria efektivitas Asimetris informasi antara <i>principal</i> dan agen
Masalah Kontrak	Agensi (<i>Moral Hazard and Adverse selection</i>) Pembagian Risiko (<i>Risk-Sharing</i>)
Domain Masalah	Hubungan di mana <i>principal</i> dan agen memiliki tujuan dan preferensi risiko yang sebagian berbeda

Sumber : Eisenhardt (1989)

Sebagai produk pengetahuan dari corak akuntansi positif, teori keagenan berfokus pada hubungan antara *principal* dan agen yang dibangun

dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi dengan kepentingannya masing-masing. Penggunaan teori keagenan dengan model tersebut selanjutnya banyak digunakan dalam memetakan konflik yang terjadi pada suatu organisasi maupun perusahaan. Namun seiring waktu teori keagenan kerap ditinjau bahkan dikritik oleh beberapa peneliti.

Salah satu variabel yang digunakan dalam meninjau teori tersebut ialah Islam sebagai sebuah bangunan ideologi. Usaha peninjauan dilakukan dengan membedah terlebih dahulu konsep keagenan yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976 lalu mulai diperbandingkan dengan nilai-nilai fundamental dalam Islam.

Adapun berikut penulis tampilkan dalam tabel 2.2 beberapa penelitian yang menggunakan Islam sebagai variabel peninjau teori keagenan.

Tabel 2.2 Penelitian berkaitan dengan tinjauan Islam terhadap *Agency Theory*

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Temuan
Anggareni, Mariska Dewi	2011	<i>Agency Theory</i> dalam Perspektif Islam	Penerapan hubungan <i>principal</i> dan agen sebagai pemegang amanah dari Allah swt.
Shamsuddin dan Ismail	2013	<i>Agency Theory in Explaining Islamic Financial Contracts</i>	Tauhid sebagai epistemologi dalam memfasilitasi dan menghalangi tujuan dan tingkat informasi yang berbeda serta perilaku oportunisme dalam sebuah kontrak
Nurwanah, Andi	2016	Menguak Kekuatan dan Problematika <i>Agency Theory</i> ditinjau dari Perspektif Islam	Ketidaksesuaian prinsip <i>agency theory</i> dengan konsep amanah yang ada di dalam Islam
Uzaimi, Achmad	2017	Teori Keagenan dalam Perspektif Islam	Prinsip muamalah yaitu tawakal dan akhlak yang baik sebagai dasar hubungan <i>principal</i> dan agen
Agustin <i>et al.</i>	2020	<i>A Critical Islamic Perspective Towards Agency Theory</i>	Kontrak antara <i>principal</i> dan agen didasarkan pada kontrak amanah dan saling memberikan akhlak mulia dalam menjalankan amanah tersebut.
Htay dan Salman	2020	<i>Agency Theory, Stewardship Theory and Stakeholder Theory, An Islamic Perspective</i>	Implementasi <i>Agency Theory</i> dan <i>Stewardship Theory</i> dalam tata kelola perusahaan memiliki ketidakseuaian dengan prinsip syariah

Sumber : Penulis (2023)

2.1.3 Asumsi Perilaku Manusia dalam Konsep Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan perusahaan sebagai seperangkat kontrak antara faktor-faktor produksi. Mereka menggambarkan bahwa perusahaan adalah fiksi hukum, di mana beberapa hubungan kontraktual hadir di antara orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Selain itu, Jensen dan Meckling (1976) juga menggambarkan bahwa perusahaan beroperasi dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai dan profitabilitasnya. Maksimalisasi kekayaan dapat dicapai melalui koordinasi dan kerja tim yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Namun, akibat kepentingan para pihak yang berbeda memunculkan konflik kepentingan yang hanya dapat diintervensi melalui kepemilikan dan kontrol manajerial.

Selain menggunakan asumsi bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan profitnya, konsep keagenan juga didasarkan pada sejumlah asumsi tentang manusia yang memiliki dampak signifikan pada pembentukan teori (Davis *et al.*, 1997). Konsep keagenan yang diajukan oleh Jensen dan Meckling didasarkan pada model ekonomi manusia yang ia sebut dengan istilah *REMM – the Resourceful, Evaluative, Maximizing Model* (Jensen dan Meckling, 1994). Dalam Smith (2011:14), dijelaskan bahwa Jensen dan Meckling berpendapat bahwa model yang mereka ajukan merupakan model yang paling mencerminkan tindakan manusia.

Jensen dan Meckling (1994) menjelaskan bahwa konsep REMM dibangun atas empat postulat yaitu *pertama* ialah setiap individu memiliki kepedulian terhadap hampir segala sesuatu yang di mana membuatnya bersedia untuk melakukan *trade-off*. Tindakan tersebut selanjutnya mengarahkan individu untuk senantiasa melakukan pengukuran yang tepat terhadap sesuatu yang ingin

ia dapatkan. *Kedua*, setiap individu memiliki keinginan yang tidak terbatas dan mengalami kesulitan dalam memuaskan sesuatu – dapat berwujud materi ataupun tidak memiliki wujud materi seperti kejujuran, kehormatan, reputasi dsb.- yang ia inginkan. *Ketiga*, setiap individu cenderung menemukan kendala dalam memuaskan keinginannya sehingga ia akan bertindak untuk memaksimalkan keinginannya. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti kekayaan, waktu, hukum alam, dan juga batasan pengetahuan yang dimiliki individu tentang suatu barang ataupun peluang. Seseorang dengan perilaku tersebut diistilahkan dengan sebutan *maximizer*. *Keempat*, setiap individu memiliki daya kreativitas yaitu kemampuan untuk memahami perubahan yang terjadi di lingkungannya dengan memprediksi konsekuensi serta merespons dengan menciptakan peluang yang baru.

Berdasarkan keempat postulat yang diajukan, Smith (2011:15) memaparkan bahwa dalam konsep REMM mengasumsikan manusia sebagai makhluk yang rasional, termotivasi secara egois dan memiliki kecenderungan untuk berperilaku oportunistik. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh manusia kerap kali menyesuaikan dengan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, oportunisme menjadi pusat pandangan yang membangun asumsi mengenai manusia dengan model ekonomi REMM.

2.1.4 Masalah Keagenan

Shamsuddin dan Ismail (2013) menemukan bahwa terdapat dua kondisi utama di mana masalah dapat muncul dari hubungan agensi. *Pertama*, ketika *principal* dan agen memiliki tujuan atau sasaran yang berbeda. Konflik tujuan yang terjadi akan mengarahkan terjadinya oportunisme agen di mana agen

bertindak sesuai dengan motivasinya sendiri. Selain itu, agen akan terarah untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan *principal* karena agen dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan *principal*. Kedua, ketika *principal* sulit mengakses informasi dan perilaku agen yang akurat. Teori keagenan mengasumsikan bahwa peran dan fungsi hubungan keagenan bersifat asimetris karena *principal* hanya mementingkan keuntungan atau pengembalian karena pekerjaan dilakukan oleh agen. Sementara itu, agen menyepakati keuntungannya sendiri dalam hal kompensasi daripada kepentingan *principal* atau organisasi.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Shamsuddin dan Ismail (2013), dalam studi yang lain Chowdhury (2004) menjelaskan bahwa masalah keagenan antara *principal* dan agen di perusahaan memiliki penyebab tertentu. Ia menunjukkan beberapa alasan terjadinya masalah keagenan sebagai berikut :

1. Pemisahan Kepemilikan dari Kontrol (*Seperation Ownership of Control*)

Pemisahan kepemilikan dari kontrol dalam organisasi besar menyebabkan hilangnya pemantauan yang tepat oleh pemilik pada manajer, di mana manajer menggunakan properti bisnis untuk tujuan pribadi mereka untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka.

2. Preferensi Risiko (*Risk Preference*)

Pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi memiliki persepsi risiko yang berbeda dan berjuang untuk berdamai dengan keputusan mereka. Konflik ini muncul antara pemilik dan manajer dan pemilik dan kreditur.

3. Durasi Keterlibatan (*Duration of Involvement*)

Manajer bekerja untuk organisasi untuk terbatas, sedangkan pemilik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan. Oleh karena itu,

agen mencoba memaksimalkan keuntungan mereka dalam masa tinggal terbatas mereka dan kemudian mengalir ke perusahaan lain.

4. *Asimetris Informasi (Information Asymmetry)*

Manajer menjaga perusahaan dan mengetahui semua informasi yang terkait dengan bisnis, sementara pemilik bergantung pada manajer untuk mendapatkan informasi. Jadi informasi tersebut mungkin tidak sampai ke pemilik dengan cara yang persis sama.

5. *Moral Hazard*

Manajer bekerja untuk pemilik dengan itikad baik, di mana pemilik memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam proyek berisiko, di mana manajer tidak menyadari risiko yang melekat pada keputusan investasi yang mereka derita.

Selain berdasarkan kondisi yang memungkinkan hadirnya masalah dalam hubungan agensi, kategorisasi dengan model yang berbeda dilakukan oleh Panda dan Leepsa (2017) di mana pembagiannya dilakukan berdasarkan aktor-aktor yang berperan pada konflik keagenan tersebut. Mereka membaginya ke dalam 3 kategori berikut

1. Masalah antar *Principal–Agen*

Masalah keagenan antara pemilik dan manajer dalam organisasi akibat pemisahan kepemilikan dari kontrol ditemukan sejak lahirnya perusahaan besar. Pemilik memberikan tugas kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa manajer akan bekerja untuk kepentingan pemilik. Namun, manajer lebih tertarik pada maksimisasi kompensasi mereka. Argumen tentang perilaku kepuasan diri agen didasarkan pada rasionalitas perilaku manusia, yang menyatakan bahwa tindakan manusia rasional dan termotivasi untuk memaksimalkan tujuan

mereka sendiri. Ketimpangan kepentingan antara *principal* dan agen serta tidak adanya pengawasan yang baik akibat struktur kepemilikan yang tersebar menimbulkan konflik, yang dikenal sebagai konflik *principal*-agen.

2. Masalah antar *Principal-Principal*

Asumsi yang mendasari jenis masalah keagenan ini adalah konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan minoritas. Pemilik besar disebut sebagai orang atau sekelompok orang yang memegang sebagian besar saham perusahaan, sedangkan pemilik kecil adalah orang-orang yang memegang bagian yang sangat sedikit dari saham perusahaan. Pemilik mayoritas atau pemegang blok memiliki kekuatan suara yang lebih tinggi dan dapat mengambil keputusan apa pun yang menguntungkan mereka, yang menghambat kepentingan pemegang saham kecil. Masalah keagenan semacam ini terjadi di suatu negara atau perusahaan, di mana kepemilikan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau dengan keluarga pemilik, maka pemegang saham minoritas merasa sulit untuk melindungi mereka kepentingan atau kekayaan.

3. Masalah antar *Principal-Kreditor*

Konflik antara pemilik dan kreditor timbul karena proyek yang dikerjakan dan keputusan pembiayaan yang diambil oleh pemegang saham. Para pemegang saham mencoba untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko, di mana mereka mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi. Risiko yang terlibat dalam proyek meningkatkan biaya keuangan dan menurunkan nilai hutang, yang mempengaruhi kreditor. Jika proyek berhasil, maka pemilik akan menikmati keuntungan yang besar, sedangkan kepentingan kreditor terbatas karena mereka hanya mendapatkan tingkat bunga tetap. Di sisi lain, jika proyek gagal, maka kreditor akan dipaksa untuk

berbagi sebagian dari kerugian dan umumnya masalah ini tetap ada dalam keadaan seperti ini.

2.1.5 Biaya Keagenan (*Agency Cost*)

Menurut Panda dan Leepsa (2017), kehadiran konsep keagenan berupaya mengedepankan konflik keagenan dan biaya yang timbul darinya. Biaya keagenan merupakan salah satu biaya internal yang melekat pada agen yang terjadi karena adanya ketidaksejajaran kepentingan antara agen dan *principal*. Ini mencakup biaya pemeriksaan dan pengambilan agen yang sesuai, pengumpulan informasi untuk memperbaiki tolok ukur kinerja, pengawasan untuk mengontrol tindakan agen, biaya pengikatan, dan kerugian karena keputusan agen yang tidak efisien.

Panda dan Leepsa (2017) menjelaskan bahwa terdapat 3 unsur dari biaya keagenan, yaitu sebagai berikut

1. Biaya Pemantauan (*Monitoring Cost*)

Biaya pemantauan melibatkan biaya yang terkait dengan pemantauan dan penilaian kinerja agen di perusahaan. Berbagai pengeluaran yang tercakup dalam biaya pemantauan adalah pembayaran untuk mengawasi, memberi kompensasi, dan mengevaluasi perilaku agen. Pemilik menunjuk dewan untuk memantau manajer; maka biaya pemeliharaan papan juga dianggap sebagai biaya pemantauan. Biaya pemantauan juga mencakup biaya perekrutan dan pelatihan dan pengembangan yang dibuat untuk para eksekutif. Biaya ini dikeluarkan oleh pemegang saham pada tahap awal tetapi pada tahap selanjutnya, ditanggung oleh manajer karena mereka diberi kompensasi untuk menutupi biaya ini (Fama dan Jensen, 1983).

2. Biaya Ikatan (*Bonding Cost*)

Pengawasan yang ketat oleh pemilik terhadap pengelola membuat mereka bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik, jika tidak maka pengelola harus menanggung biaya pemantauan. Pada dasarnya, biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan dan mengoperasikan sesuai dengan sistem yang ditetapkan perusahaan dikenal sebagai biaya ikatan. Biaya ikatan melekat pada manajer, di mana manajer perusahaan berkomitmen pada kewajiban kontraktual yang membatasi aktivitas mereka. Biaya pemantauan dan biaya pengikatan berjalan sebaliknya, di mana biaya pengikatan meningkat dengan penurunan biaya pemantauan.

3. Kerugian Sisa (*Residual Loss*)

Konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer sering kali menghadirkan masalah di mana keputusan yang diambil oleh manajer tidak selaras untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Keputusan manajerial yang tidak efisien ini menyebabkan kerugian yang dikenal sebagai kerugian residu. Williamson (1988) menjelaskan bahwa *residual loss* merupakan komponen kunci dari *agency cost* yang harus dikurangi oleh *principal*. Untuk mengurangi *residual loss*, pemilik mengeluarkan biaya *monitoring* dan *bonding cost*.

2.2 Prinsip Dasar Islam

2.2.1 Tauhid sebagai Pondasi Keimanan

Sebagai suatu keseluruhan, agama Islam dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari dua bagian yang saling berhubungan. Yazdi (1996:8) menjelaskan bahwa sistem kesatuan Islam tersebut dapat dibedakan menjadi

dua yaitu sistem akidah dan sistem nilai. Bagian pertama atau disebut juga *ushul ad-din* merupakan sistem yang mengatur hal yang bersifat prinsip-prinsip dasar sedangkan bagian kedua atau *furu'ddin* merupakan seperangkat kewajiban-kewajiban yang berdasarkan syariat. Kedua sistem ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi di mana apabila posisi *ashl* (prinsip) itu kukuh maka hal itu akan berdampak pada kualitas *far'* (cabang) yang dihasilkan. Dalam arti lain bahwasanya hal yang bersangkutan dengan keimanan perlu diperkuat terlebih dahulu sebelum memberi perhatian kepada efek-efek amaliahnya.

Hal yang merupakan *ashl* (prinsip) dasar pertama dalam Islam ialah pengesaan Allah swt. Pengakuan bahwa hanya terdapat satu Tuhan menjadi syarat utama ketika seseorang ingin menjadi seorang muslim. Konsep monoteisme Tuhan ini dikenal juga dengan istilah Tauhid. Secara leksikal, tauhid memiliki arti yaitu menganggap sesuatu itu satu. Dalam Islam, penggunaan istilah ini berarti memandang Allah swt. sebagai satu dan satu-satunya.

Yazdi (2012:177) menjelaskan bahwa penggunaan istilah tauhid digunakan dalam arti yang beragam oleh para filsuf, teolog ataupun ulama. Makna pertama yang paling umum ialah keyakinan akan keesaan-Nya dalam pengertian mengakui bahwa Allah swt. memiliki wujud mandiri dan terpisah dari yang lain. Kedua, yakni meyakini keesaan Allah swt. dalam Zat Allah swt. yang sederhana dan ketiadaan rangkapan atau penafian atas ketersusunan baik yang bersifat aktual maupun potensial. Ketiga, ialah keyakinan bahwa sifat-sifat *Zatiah* itu identik dengan Zat Allah swt. dan menafikan sifat-sifat yang berbeda dengan Zat-Nya. Istilah ini juga disebut dengan "Tauhid Sifat". Keempat adalah Tauhid Tindakan yaitu pernyataan bahwa Allah swt. dalam segala tindakan-Nya tidak butuh kepada apa pun dan tidak ada yang mungkin memberikan bantuan kepada-Nya. Makna yang terakhir yakni keyakinan bahwa seluruh makhluk

dalam segala tindakannya akan selalu butuh kepada Allah swt. di mana segala interaksi pengaruh yang berlangsung terjadi atas izin-Nya dan berada di bawah kekuasaan yang dianugerahkan kepada mereka.

Dalam pengertiannya yang beragam, salah satu derajat tauhid yang paling sederhana dan mudah dipahami ialah tauhid dalam penciptaan. Kepercayaan ini memosisikan bahwa dunia wujud diciptakan oleh satu Pencipta. Keyakinan jenis ini ternyata dapat pula ditemukan di kalangan orang-orang musyrik khususnya kaum musyrik Mekah yang di mana mereka tidak menyangkal adanya Allah swt. namun di sisi lain mereka juga mempercayai keberadaan berhala atau dewa-dewa sebagai sosok yang mengatur perkara duniawi sehingga mereka turut menyembah berhala tersebut. Dengan begitu, posisi Islam tidak dapat terbatas pada keyakinan atas penciptaan dunia semata namun kepercayaan terhadap keesaan Pencipta perlu disertai dengan penyembahan kepada-Nya atau yang disebut juga dengan tauhid *rububiyah* (Yazdi, 1996)

Tauhid dalam hal ketuhanan atau *rububiyah* merupakan konsep Tauhid yang mengakui kelaziman-Nya dalam mengatur segala urusan. Yazdi (2012:117) menjelaskan bahwa *rububiyah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *rububiyah takwini* dan *rububiyah tasyri'i*. Tauhid yang menyangkut *rububiyah takwini* (pengaturan cipta) ialah mempercayai bahwa dalam realitas penciptaan serta hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pengaturan alam semesta seperti peredaran bulan dan matahari, munculnya siang dan malam, pemeliharaan langit dan bumi, dan lain sebagainya berada sepenuhnya dalam kekuasaan Allah swt. Hal ini mengartikan bahwa segala perubahan dan pengaruh apa pun yang ditimbulkan makhluk terjadi atas izin Allah swt. beserta kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Sedangkan *rububiyah tasyri'i*

(pengaturan titah) merupakan keyakinan yang menuntut manusia untuk mengambil pengarahannya hanya dari Allah swt.

Melalui dua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *rububiyah* merupakan konsep yang memiliki perhatian pada aspek relasi yang khusus terjadi di antara para makhluk di mana konsep tersebut mampu diperoleh akal dari proses penciptaan serta hubungan antara satu makhluk dengan yang lainnya. Konsep ini bersifat relasional yang di dalamnya terdapat hubungan niscaya (*talazum*) dalam pengertian bahwa Pengatur alam semesta ini mustahil bukan Penciptanya. Hal ini mengartikan bahwa Zat yang menciptakan seluruh makhluk dan menciptakan hubungan antar sesamanya merupakan Zat yang juga turut memelihara dan mengaturnya (Yazdi, 2012)

Dari posisi ini dapat diketahui bahwa untuk menjadi *muwahhid* atau seseorang yang memandang Allah swt. sebagai satu-satunya maka ia perlu mengetahui dan meyakini keesaan Allah swt. dalam berbagai tahap yang meliputi keyakinan atas keesaan Pencipta (tauhid penciptaan), keesaan Tuhan dalam hal pengaturan dan penciptaan (tauhid pengaturan cipta), serta keesaannya dalam hal pemberian hukum (tauhid pengaturan titah). Setelah percaya pada ketiga hal tersebut, ketauhidan seseorang disempurnakan dengan Tauhid *Uluhiyah*, yakni kepercayaan bahwa hanya Allah swt. Tuhan yang patut disembah. Konsep *Uluhiyah* merujuk pada kata *Ilah* yang berarti *al-Ma'bud* (Yang Disembah) atau bermakna yang berhak diibadahi dan ditaati. Kalimat *La Ilaha Illallah* tidak hanya menunjukkan tauhid dalam hal Allah swt. sebagai pencipta namun pada tahap lain turut memastikan bahwa hanya Allah swt. semata Tuhan yang patut disembah (Yazdi, 1996)

Al-Fauzan (2012:54) menjelaskan bahwa seorang yang meyakini tauhid *rububiyah* mengharuskan ia untuk meyakini tauhid *uluhiyah*. Ia menjelaskan

bahwa pertama-tama manusia akan bergantung pada asal kejadiannya lalu berpindah pada cara-cara yang bisa memperkuat hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Ia menempatkan *tauhid rububiyah* sebagai pintu gerbang dari *tauhid uluhiyah* yang dapat berarti barang siapa yang mengimani bahwa tidak ada pencipta ataupun pengatur alam semesta kecuali Allah swt. maka ia harus pula mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah swt. Hal itu turut terjelaskan dalam Al-Quran bagaimana penciptaan alam semesta menjadi dasar atas kewajiban terhadap penyembahan Allah swt.

“Hai manusia, sembahlah Tuhan kalian Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui.” (QS [2]:21-22)

Dengan argumen yang hampir sama, Yazdi (1996:28-29) turut menjelaskan bahwa kebutuhan akan ibadah kepada Allah swt. hadir sebagai tindakan efektif yang dipilih oleh manusia atas kepercayaannya terhadap kekuatan dan kendali Allah swt. Ia menjelaskan bahwa ketika manusia menolak untuk tunduk kepada-Nya sementara ia mengakui bahwa segala penciptaan dan pengaturan berada dalam kuasa-Nya merupakan tindakan yang tidak efektif dan sia-sia. Seseorang tunduk dan merendah pada yang lain apabila ia menganggap tindakan itu sebagai hal yang perlu untuk dilakukan. Dengan begitu, pengetahuan manusia terhadap kemampuan Pencipta perlu dipastikan pula dengan ketundukan serta ketaatannya untuk beribadah kepada-Nya.

2.2.2 Konsep Manusia sebagai Khalifah

Dalam Yazdi (2012:104), Ia membagi sifat Allah swt. menjadi dua kelompok yaitu *Zatiah* dan *Fi'liyah*. Sifat *Zatiah* merupakan sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah swt. (biasanya berupa konsep-konsep) yang diperoleh akal dari pengamatannya atas Zat Allah swt. sambil menekankan bahwa sifat-sifat tersebut mencakup berbagai kesempurnaan, seperti sifat hidup (*al-hayah*), ilmu (*al-'ilm*) dan kuasa (*al-qudrah*). Sifat *Fi'liyah* merupakan sifat yang biasanya berupa konsep yang diperoleh akal dari pengamatannya atas bentuk-bentuk hubungan antara Allah swt. dengan makhluk-makhluk-Nya seperti penciptaan (*al-khaliqiyah*) dan pemberian rezeki (*al-raziqiyah*).

Perbedaan mendasar antara dua sifat tersebut terletak pada hubungan perolehannya di mana kelompok pertama merupakan gambaran konsep yang diperoleh melalui realitas objektif yang nyata bagi Zat Allah swt. sementara kelompok sifat kedua merupakan konsep-konsep yang diperoleh akal dari pengamatannya atas bentuk-bentuk relasi antara Allah swt. dan makhluk-Nya. Kelompok *Zatiah* sering juga disebut dengan sifat Zat sedangkan kelompok *Fi'liyah* disebut sebagai sifat Perbuatan.

Dengan mengamati hubungan tertentu antara Allah swt. dan ciptaan-Nya, maka diperoleh salah satu sifat perbuatan Allah swt. yaitu *Khaliq* atau *Al-Khaliqiyah*. Yazdi (2012:115) menjelaskan bahwa sifat ini didapatkan melalui penjelasan atas Wujud Niscaya Ada (*Wajib Al Wujud*) sebagai Sebab Utama bagi keberadaan *mumkin al wujud* yang memperhatikan bahwa segala yang ada itu pada wujudnya sendiri bergantung mutlak kepada Allah swt. Dari sini dapat ditemukan sifat Pencipta Al-khaliqiyah pada Wajib Al-Wujud dan sifat yang dicipta (*makhluiyah*) pada makhluk-Nya.

Tarigan (2014:87) mengatakan bahwa kata *Khalaqa* mengandung makna yaitu penciptaan dari ada menjadi tidak ada atau penciptaan sesuatu yang baru dari sesuatu yang ada terlebih dahulu. Melalui sifat Khaliqiyah-Nya dapat diketahui bahwa Allah swt. melakukan tindakan penciptaan yang mana salah satu makhluk yang Ia ciptakan ialah manusia.

Dalam Al-Quran, Allah swt. berfirman yang artinya “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin:4). Ayat tersebut memperlihatkan kesungguhan Allah swt. dalam menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik (*ahsanutaqwim*). Hal tersebut dapat terlihat pula dari proses penciptaan manusia yang sedemikian terencana dan melalui beberapa tahap.

Selain proses penciptaannya yang sempurna, Islam sebagai agama universal dan terarah turut pula mengatur tujuan dari penciptaan manusia. Allah swt. telah mengisyaratkan suatu konsep yang mengatur manusia, yakni sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Konsep ini diperoleh dari tafsiran atas ayat dalam Alquran yang artinya:

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]:30)

Tarigan (2014:92-93) menjelaskan bahwa setidaknya manusia memiliki dua fungsi yang tidak bisa dipisahkan yaitu sebagai hamba (*abd'*) dan khalifah. Sebagai hamba Allah swt., manusia perlu menyadari bahwa keberadaan dirinya sangat bergantung pada pencipta-Nya yang mana hal tersebut berimplikasi pada kesadarannya untuk senantiasa taat kepada Allah swt. dengan cara menjalankan ibadah hanya kepada-Nya. Di lain sisi, sebagai khalifah manusia perlu menyadari

bahwa dirinya memiliki kebebasan dan memiliki kemampuan untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi.

Nasr (2003:16) dengan kesimpulan yang sama memperinci bahwa setidaknya manusia memiliki dua karakter utama yaitu penghambaan dan kekhalifahan. Adapun karakter pertama berlaku pasif terhadap Tuhan dengan menyerahkan diri kepada Kehendak-Nya sedangkan yang kedua bersifat aktif dalam posisi sebagai wakil Tuhan dan melaksanakan Kehendak-Nya di dunia.

Salah satu istilah yang berkaitan langsung dengan peran manusia sebagai khalifah disebut dengan insan. Insan dimaknai sebagai makhluk yang diberi ilmu dan diajarkan bahasa konseptual. Dengan turut meninjau rancangan penciptaannya dapat diketahui bahwa manusia dibekali dengan potensi akal yang memiliki daya untuk memilah ataupun memutuskan sesuatu. Akal tersebut menjadi fasilitator yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan tugas dan perannya. Potensi tersebut menjadikan manusia memiliki perbedaan tingkatan dengan makhluk ciptaan Allah swt. lainnya sekaligus membuat manusia menjadi makhluk yang potensial untuk mengemban tugas sebagai khalifah (Tarigan, 2014:84).

Dengan potensi yang dianugerahi kepada manusia, hadir pula serangkaian hak dan tanggung jawab yang turut mengikutinya. Afzalurrahman (1997:78) menjelaskan bahwa manusia diberikan kepercayaan untuk memelihara seluruh harta kekayaan milik Tuhan. Bersamaan dengan itu, Allah swt. secara tidak langsung mengakui hak dan tanggung jawab atas pengelolaan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kepada manusia. Dalam pengaturannya, Islam menggolongkan hak tersebut ke dalam kategori hak yang bersifat perorangan, di mana hal ini menjadi dasar pengakuan atas hak milik pribadi dalam Islam. Sebagai suatu sistem ekonomi yang menganut prinsip

keharmonisan, Islam memperbolehkan adanya hak milik pribadi dengan menentukan beberapa batasan dan pengaturan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan terhadap sesama manusia (Afzalurrahman, 1997)

2.3 Konsep Islam Emansipatoris

2.3.1 Konteks Kelahiran Gagasan Islam Emansipatoris

Yazdi (2012:27) menjelaskan bahwa kata *din* (agama) secara leksikal berasal dari bahasa arab yang berarti ketaatan dan balasan sedangkan secara teknis, *din* memiliki arti yaitu iman kepada Pencipta manusia dan alam semesta serta kepada hukum praktis yang sesuai dengan keimanan tersebut. Dalam konteks kemunculannya sebagai sesuatu yang dipercayai oleh banyak orang, pembahasan terkait agama masih menjadi perdebatan tersendiri di kalangan ulama, ahli sejarah agama, maupun para sosiolog. Namun untuk Islam sendiri, Yazdi menjelaskan bahwa Islam sebagai agama dinyatakan lahir seketika kelahiran manusia pertama di muka bumi yang sekaligus menjadi penyeru ajaran tauhid (pengesaan Allah swt.) yaitu Nabi Adam As. Berdasarkan hal ini menjadikan agama Islam tergolong dalam agama tauhid.

Yazdi (2012:29) mengatakan bahwa agama tauhid merupakan agama samawi yang hakiki dengan tiga prinsip universalnya yaitu Pertama iman kepada Allah swt. Yang Maha Esa, Kedua Iman kepada kehidupan abadi setiap manusia di akhirat kelak untuk menerima pembalasan amal yang pernah dia lakukan semasa hidupnya di dunia dan yang ketiga ialah iman kepada para nabi dan rasul yang diutus Allah swt. untuk memberi hidayah dan bimbingan kepada seluruh umat manusia demi mencapai puncak kesempurnaan dan kebahagiaan dunia serta akhirat.

Dalam perkembangannya, Islam sebagai agama mulai berhadapan dengan berbagai macam wacana. Pertemuannya dengan beragam wacana membuat Islam hadir dengan beberapa bentuk. Mas'udi (2004) memetakan jenis Islam tersebut ke dalam kategori sebagai berikut

Pertama, Islam skriptualistik, tekstualistik atau formalistik yang merupakan Islam yang berfokus penuh kepada teks. Model ini menempatkan teks sebagai titik awal dan akhir sehingga menjadikan teks sebagai sesuatu yang sangat penting. Konsekuensinya ialah kehadiran sakralisasi teks Alquran yang apabila berhadapan dengan wacana akan cenderung minim upaya kontekstualisasi.

Kedua, Islam ideologis yaitu Islam yang berangkat tidak dari teks namun dari pilihan kebenaran dan idenya sendiri yang diideologikan. Pola keislaman ini menggunakan teks sebagai pembenaran legitimasi dan justifikasi sehingga kesan Islam yang hadir menjadi tertutup dan melihat agama maupun 'isme' lain sebagai ancaman. Kehadiran model tersebut dipicu oleh kepentingan kekuasaan yang banyak subur dalam pewacanaan politik.

Ketiga, Islam modernis yang memiliki visi untuk melakukan rekonsiliasi teologis terhadap realitas modern. Pembentukan Islam ini dilakukan melalui serangkaian justifikasi dan penyesuaian teologis (ishlah) terhadap fakta-fakta kemodernan.

Menurut Mas'udi (2004), ketiga kelompok Islam tersebut masing-masing memiliki kekurangan dalam mengurai dan menjawab realitas yang menimpa umat Islam saat ini. Berangkat dari ketidakmemadaan tersebut, ia mengusulkan untuk menggunakan konsep emansipatoris sebagai alternatif dalam pemetaan kelompok Islam dalam posisinya ketika berhadapan dengan sebuah wacana.

2.3.2 Prinsip Dasar Islam Emansipatoris

Kehadiran gagasan Islam emansipatoris yang diusulkan oleh Masdar F. Mas'udi tidak terlepas dari pemikiran beberapa tokoh seperti Habermas, Ashgar Ali Engineer, Hassan Hanafi dan Farid Esack. Habermas sendiri berperan dalam membangun landasan teoretis dari konsep yang ditawarkan oleh Mas'udi sedangkan ketiga tokoh lainnya yang merupakan ahli filsafat Islam yang memberikan kontribusi dengan memperkenalkan pendekatan filsafat sebagai metode konstruksi seperti fenomenologi dan hermeneutika (Verdiansyah, 2004:15)

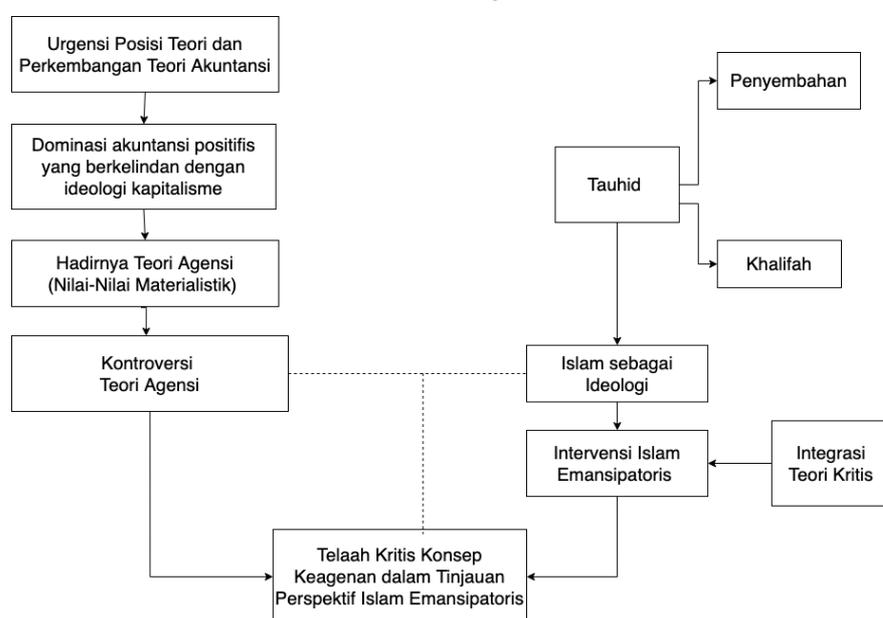
Mas'udi (2004) menjelaskan bahwa rujukan yang ia gunakan dalam mengembangkan konsep Islam emansipatoris tidak dapat dilepas dari sejarah teori kritis. Kritisisme di sini digunakan sebagai perspektif yang memiliki dua elemen penting yaitu realitas material dan visi yang bersifat transformatif. Elemen pertama merupakan sebuah pemikiran yang bertolak pada kehidupan riil dan materiil untuk mempertanyakan ideologi hegemonik yang hadir dalam realitas sosial sedangkan elemen kedua merupakan komitmen yang diusung dalam melakukan perubahan struktural (relasi-relasi).

Lebih lanjut, Verdiansyah (2014:88) menjelaskan bahwa perbedaan yang mencolok antara Islam Emansipatoris dengan model Islam lainnya terletak pada paradigma dan perspektif yang diembannya. Ia memaparkan bahwa terdapat empat poin landasan teoretis yang membentuk model Islam emansipatoris ini, yaitu *Pertama*, penggunaan sudut pandang terhadap teks di mana terdapat suatu upaya politisasi teks dengan menjadikan teks sebagai dokumen hukum dan politik yang diterapkan sebagai alternatif perubahan ke arah yang lebih baik. *Kedua*, sikap kritis terhadap modernitas dengan melihatnya sebagai suatu sistem dan ideologi yang menyebabkan berbagai penindasan, diskriminasi atau pun

dominasi terjadi. *Ketiga*, komitmen yang kuat dalam mengapresiasi budaya lokal dalam rangka menggali kearifan lokal (*local wisdom*). *Keempat*, penekanan lebih terhadap aspek partisipasi dan aksi pada tataran praksis di mana terdapat keyakinan bahwa proses perubahan hanya dapat terjadi dengan berangkat dari realitas sosial masyarakat (*bottom up*).

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis (2022)

Teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976 memiliki andil yang besar dalam membentuk iklim pengetahuan terkhusus dalam bidang akuntansi manajemen. Posisinya sebagai sebuah teori dianggap mampu memberikan solusi terhadap sejumlah masalah yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan ataupun organisasi. Dalam perjalanannya sebagai sebuah teori, ia erat dipengaruhi oleh corak akuntansi positif yang berkelindan dengan ideologi kapitalisme yang mempunyai tendensi eksploitatif.

Di balik pengaruhnya yang cukup besar, penggunaannya sebagai teori dinilai cukup kontroversial. Sejumlah peneliti menilai bahwa teori keagenan yang mulai dipopulerkan pada tahun 1976 tersebut memiliki ketidakmemadaan dalam mengungkap permasalahan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Hal tersebut mendorong dilakukannya beberapa penelitian untuk meninjau bahkan melakukan kritik atas teori yang fokus membahas hubungan antara *principal* dan agen tersebut.

Usaha yang serupa turut diupayakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisisnya melalui perspektif Islam. Proses analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep Islam sebagai ideologi berbasis tauhid dengan konsep penyembahan dan khalifah sebagai prinsip mendasar. Berikutnya, hal tersebut dipadankan dengan aspek emansipatoris dalam Islam yang mensyaratkan adanya intervensi teori dan sikap kritis.